

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendidikan Berbasis Pesantren

Secara umum, sejarah berkembangnya Pondok Pesantren adalah sejarah perkembangan agama Islam di Indonesia, dan merupakan salah satu model pendidikan bercirikan Islam yang tertua. Secara bahasa, *Pondok* yang diambil dari bahasa Arab *al-Fundûq* (الفندق) berarti hotel, penginapan¹, sedang Pesantren diambil dari kata *Santri*—yang berarti murid—dengan mendapatkan imbuhan *pe + an*² menjadi *Pesantrian*, lalu bermetamorfosis menjadi *Pesantren*. Dari sini, arti Pondok Pesantren dapat dipahami sebagai *pusat kajian Islam untuk siswa-siswa yang diasramakan*. Keputusan Lokakarya Intensifikasi Pengembangan Pondok Pesantren (Jakarta, 2-6 Mei 1978) menyebutkan definisi Pondok Pesantren sebagai berikut :

*Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang minimal terdiri dari 3 unsur, yaitu (1) Kiai/syekh/ustadz yang mendidik serta mengajar, (2) Santri dengan asramanya, dan (3) Masjid.*³

Mastuhu memberikan pengertian Pesantren sebagai berikut :

*Lembaga pendidikan Islam untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam (tafaquh fiddina) dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup sehari-hari.*⁴

Kelahiran dan perkembangan Pondok Pesantren terjadi seiring dengan perkembangan Islam di Nusantara, yang telah menghadapi berbagai macam perubahan sosial politik—mulai era kerajaan-kesultanan, masa penjajahan,

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, hal. 1073.

² Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, LP3ES, Jakarta, 1984, hal. 18.

³ Lihat Haidar Putra Daulay, *Historitas dan Eksistensi : Pesantren, Sekolah dan Madrasah*, Tiara Wacana, 2001, Yogyakarta, hal. 13.

⁴ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS, 1994, hal. 6.

masa kemerdekaan, hingga Orde Lama dan Orde Baru. Perubahan-perubahan yang terjadi itu, di antaranya, diawali dengan adanya pendidikan tradisional Pondok Pesantren dalam bentuk pengajian di rumah-rumah, lalu di mushola atau langgar yang dibangun si pemilik rumah, lalu dibuatkanlah ruang-ruang untuk peristirahatan peserta pengajian, dan menjelma menjadi satu kesatuan Pondok Pesantren atau Pendidikan yang berbasis Pondok Pesantren. Menurut Azyumardi Azra, kehadiran Pondok Pesantren disebabkan karena dua alasan, yakni: *Pertama*, Pondok Pesantren hadir untuk merespon situasi dan kondisi suatu masyarakat yang dihadapkan pada runtuhnya sendi-sendi moral atau bisa disebut perubahan sosial. *Kedua*, didirikannya Pondok Pesantren adalah untuk menyebarluaskan ajaran Islam ke seluruh pelosok Nusantara.⁵ Mastuhu menulis,

*Pesantren merupakan salah satu jenis pendidikan Islam Indonesia yang bersifat tradisional untuk mendalami ilmu agama Islam, dan mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian, atau disebut tafaqquh fiddin, dengan menekankan pentingnya moral dalam hidup bermasyarakat.*⁶

Istilah Pendidikan Berbasis Pesantren bukanlah istilah yang sederhana. Makna pendidikan—dalam perspektif pesantren—telah memuat makna dan spirit *tarbiyah* (pembinaan) & *ta'lim* (pengajaran) sekaligus. Ini selaras dengan pengertian pendidikan menurut Plato yang menyatakan bahwa pendidikan adalah mengasuh jasmani dan rohani, supaya sampai kepada keindahan dan kesempurnaan yang mungkin dicapai. Atau pengertian menurut Jules Simon yang mengatakan bahwa pendidikan adalah jalan untuk merubah akal menjadi akal yang lain dan merubah hati menjadi hati yang lain.⁷ Namun, dalam perkembangannya, aktualisasi proses pendidikan yang ada di negara ini cenderung menyempit menjadi pengajaran. Padahal, negara telah menjamin urgensi pendidikan moral (agama) sebagaimana diatur dalam berbagai

⁵ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), hal 51.

⁶ *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, Ibid, hal. 3.

⁷ Pendapat Plato dan Jules Simon dikutip dari Mahmud Yunus, *Pokok-Pokok Pendidikan dan Pengajaran*, Pt. Hidakarya Agung, Jakarta, t.t., halaman 5.

ketentuan.⁸ Secara normatif, negara tidak pernah memisahkan antara *tarbiyah* dan *ta'lim*.

Kedua semangat itu—pembinaan dan pengajaran—yang menjadi kekuatan utama pendidikan yang diimplementasikan di Pondok Pesantren. Spirit *tarbiyah* yang diaktualisasikan dalam pendidikan ala Pondok Pesantren bukanlah suatu kelebihan, melainkan sebuah ciri khas. Artinya, Pendidikan Pondok Pesantren yang tidak menerapkan *tarbiyah* sebagai sebuah ciri khas maka ia bukanlah Pondok Pesantren yang sebenarnya, melainkan “lembaga pendidikan yang diasramakan”. Dengan demikian, menjadikan *tarbiyah* sebagai model dan fokus adalah harga mati bagi pendidikan di Pondok Pesantren. Mahmud Yunus menegaskan perbedaan 2 elemen ini dengan kalimatnya sebagai berikut⁹ :

Perbedaan antara mendidik dan mengajar besar sekali. Mendidik (adalah) menyiapkan anak-anak dengan segala macam jalan, supaya dapat mempergunakan tenaga dan bakatnya dengan sebaik-baiknya, sehingga mencapai kehidupan yang sempurna dalam masyarakat tempat tinggalnya. Sebab itu pendidikan mencakup pendidikan jasmani, 'aqli, khuluqi, perasaan, keindahan, kemasyarakatan. Adapun mengajar adalah salah satu segi dari beberapa segi pendidikan yang bermacam-macam itu.

Pendidikan Pondok Pesantren selama ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik anak bangsa. Seorang kiai yang mengasuh sebuah pesantren bukan sekedar guru atau orang tua bagi para santri-santrinya, melainkan juga sebagai agen perubahan sosial. Untuk mengimplementasikan konsep *tarbiyah* dan *ta'lim*, Pondok Pesantren memiliki komponen-komponen. Zamakhsari menyebutkan ada 4 komponen Pondok Pesantren, yaitu pondok, santri, pengajaran kitab-kitab klasik dan kiai, sedangkan

⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

⁹ Mahmud Yunus, *Pokok-Pokok Pendidikan dan Pengajaran*, halaman 18-19.

Abdurrahman Mas'ud menambahkan satu unsur Kitab Kuning.¹⁰ Secara lebih sederhana, komponen Pondok Pesantren adalah sebagai berikut :

1. Kiai

Seorang Kiai disyaratkan memiliki kemampuan-kemampuan tertentu untuk memimpin Pondok Pesantren. Secara umum, seorang Kiai menguasai berbagai disiplin ilmu studi-studi Islam, serta memiliki perilaku yang sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Namun, banyak pula yang cukup menguasai satu disiplin ilmu tertentu. Yang jelas, seorang Kiai harus memiliki ilmu mendidik, sebab ia bukan sekedar pemimpin Pondok Pesantren saja, melainkan juga tokoh perubahan sosial (*agent of social change*).¹¹ Seorang Kiai memiliki peranan aktif dalam perubahan sosial, bahkan memelopori perubahan sosial itu dengan caranya sendiri. Masalah yang dihadapi seorang Kiai bukanlah bagaimana kebutuhan akan perubahan itu dapat dipenuhi tanpa merusak ikatan-ikatan sosial yang telah ada, melainkan justru dengan memanfaatkan ikatan-ikatan sosial itu sebagai mekanisme perubahan sosial yang diinginkan.¹²

2. Santri

Dengan berbagai klasifikasinya—misalnya santri *Mukim* dan *Kalong*—santri adalah elemen pokok dalam proses pendidikan di Pondok Pesantren. Data yang pernah diambil oleh Kementerian Agama RI menyebutkan bahwa jumlah santri di Pondok Pesantren adalah 3.369.193¹³—jumlah sesungguhnya diyakini lebih banyak sebab banyak

¹⁰ Lihat *Tradisi Pesantren*, hal. 44, dan Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren: Perhelatan Intelektual dan Tradisi*, LKiS, Yogyakarta, 2004.

¹¹ Lihat Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial*, P3M, Jakarta, 1987. Lihat juga Lathiful Khuluk, *Fajar Kebangunan Ulama : Biografi KH. Hasyim Asy'ari*, LKiS, Yogyakarta.

¹² Dikutip dari Abdurrahman Wahid dalam pengantarnya atas Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial*, hal xvii.

¹³ Direktorat Jenderal Kelembagaan Pendidikan, Departemen Agama, *Statistik Pendidikan Agama & Keagamaan Tahun Pelajaran 2003-2004*, Desember 2004.

Pondok Pesantren yang tidak terdaftar atau mendaftarkan diri di Kementerian Agama.

3. Kegiatan Pengajian

Sebagai bagian penting dalam proses pembentukan akhlak sebagai tujuan utama belajar di Pondok Pesantren. Kegiatan-kegiatan yang masuk ini dalam elemen ini antara lain shalat & dzikir berjamaah, sertra pengajian kitab—baik kuning maupun putih. Kontinuitas kegiatan seperti shalat dan berzikir berjamaah dalam proses kegiatan pendidikan di Pondok Pesantren menjadi kegiatan wajib yang tidak bisa ditawar—atau diwakilkan. Di lembaga pendidikan apapun—selama diakui sebagai Pondok Pesantren—maka tersebut dipastikan ada.

4. Pemandokan

Adalah bangunan yang meliputi kamar santri dan mushola. Menurut Zamakhsari Dhofier, ada 3 alasan kenapa pemandokan harus ada, yaitu¹⁴:

- a. Para santri datang dari tempat jauh yang bertujuan untuk menimba ilmu kepada kiai,
- b. Pesantren lebih banyak berada di desa-desa, dimana tidak tersedia perumahan untuk santri, dan
- c. Hubungan timbal balik antara kiai dan santri jika hidup dan tinggal di satu area atau kompleks.

5. Kitab Kuning

Sebagai materi yang dikaji para santri selama mukim di Pondok Pesantren, Kitab Kuning adalah komponen atau unsur yang sangat urgen. Menguasai Kitab Kuning, yang terdiri dari berbagai spesifikasi dan tingkatan, menjadi prasyarat seorang santri untuk menjadi seorang Kiai.

Komponen-komponen itu nampaknya bukan berdasarkan konsep produk asli lokal, melainkan mengikuti ide-ide yang diberlakukan sejumlah lembaga pendidikan di Timur Tengah berabad-abad lampau. Demikian pula dengan jenis-jenis pendidikan di Pondok Pesantren. Jika harus memilah jenis-

¹⁴*Tradisi Pesantren*, Op. cit., hal. 47-54.

jenisnya, maka kita akan mendapatkan banyak klasifikasinya, terutama berdasarkan dari tema-tema yang dialami di Pondok Pesantren tersebut. Ada Pondok Pesantren yang memfokuskan pendidikannya pada pengajaran materi fiqihnya saja, atau ilmu *alat* atau gramatika Arab saja, atau *Tahfidz* Al-Qur`an saja. Ada juga Pondok Pesantren yang fokus kepada tema lain, misalnya pesantren penanganan korban obat-obatan terlarang, atau pondok pesantren yang memfokuskan kepada praktik-praktik (*'amaliyah*) tarekat. Sehingga, masing-masing klasifikasi, jenis dan warna Pondok Pesantren tersebut memiliki corak-corak tersendiri—tidak termasuk metode-metode pengajaran seperti *Sorogan*, *Bandongan* dan sebagainya sebagaimana dicatat oleh Zamakhsari Dhofier.¹⁵

Pondok Pesantren merupakan institusi merdeka, plural dan tidak seragam. Pluralitas Pondok Pesantren dapat ditunjukkan oleh tiadanya sebuah aturan atau kesepakatan apapun, baik menyangkut manajerial, administrasi, birokrasi, budaya, kurikulum, termasuk pemihakan politik. Aturan hanya datang dari pemahaman keagamaan yang dipersonifikasikan melalui pengajian Kitab Kuning. Tidak mudah untuk membuat pola atau mengklasifikasikan Pondok Pesantren. Bahkan dikatakan sulit untuk dipolakan secara tajam. Dikatakan juga, bukan suatu hal yang mustahil terjadi setelah pesantren-pesantren dipolakan ke dalam beberapa pola, masih saja ada satu atau dua pesantren yang sulit untuk dimasukkan ke dalam pola-pola yang telah ditetapkan.¹⁶ Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pernah melakukan penelitian tentang pola pesantren dengan mengambil lokasi di Bogor Jawa Barat dan hasilnya adalah sebagai berikut :

1. Pola I, terdiri dari masjid dan rumah kiai.
2. Pola II, terdiri dari masjid, rumah kiai dan pondok.
3. Pola III, terdiri dari masjid, rumah kiai, pondok dan madrasah.

¹⁵*Tradisi Pesantren*, Op. cit., hal. 28-29.

¹⁶ Lihat Haidar Putra Daulay, *Historitas dan Eksistensi*, Op. cit., hal. 31-34.

4. Pola IV, terdiri dari masjid, rumah kiai, pondok, madrasah dan tempat ketrampilan.
5. Pola V, terdiri dari masjid, rumah kiai, pondok, madrasah, tempat ketrampilan, universitas, gedung pertemuan, tempat olahraga, sekolah umum.¹⁷

Ada juga pola pesantren berdasarkan kurikulumnya, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pola I, materi yang dikemukakan di pesantren adalah mata pelajaran agama yang bersumber dari kitab-kitab klasik (kitab kuning). Metode ini adalah *wetonan* dan *sorogan*, tidak mengenal klasikal.
2. Pola II, hampir sama dengan Pola I, hanya saja proses belajar mengajar dilaksanakan secara klasikal dan non klasikal. Santri dibagi dalam jenjang pendidikan mulai ibtdaiyah, tsanawiyah dan aliyah.
3. Pola III, pada pola ini kurikulum telah ditambahi dengan mata pelajaran umum, dan aneka kegiatan ketrampilan, kesenian, organisasi dan lainnya.
4. Pola IV, pola ini menitikberatkan pelajaran ketrampilan disamping agama. Ketrampilan ditujukan untuk bekal kehidupan santri setelah tamat pesantren, meliputi pertanian, pertukangan dan peternakan.
5. Pola V, pada pola ini materi yang diajarkan di pesantren adalah sebagai berikut :
 - a. Pengajaran kitab klasik.
 - b. Madrasah, di pesantren diadakan pendidikan model madrasah, selain mengajarkan mata pelajaran agama, juga pelajaran umum. Kurikulum madrasah dibagi menjadi dua bagian ;
 - i. Kurikulum yang dibuat oleh pondok sendiri,
 - ii. Kurikulum pemerintah dengan memodifikasi materi agama.
 - c. Ketrampilan.
 - d. Sekolah umum, pesantren juga menyelenggarakan sekolah umum yang kurikulumnya mengikuti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan kurikulum pendidikan agama disusun oleh pesantren sendiri.
 - e. Perguruan tinggi, beberapa pesantren yang tergolong besar telah membuka perguruan tinggi.¹⁸

¹⁷ Haidar Putra Daulay, *Historitas dan Eksistensi*, Op. cit., hal. 32.

¹⁸ Haidar Putra Daulay, *Historitas dan Eksistensi*, Op. cit., hal. 33-34.

Tidak ada satu kekuatan pun yang dapat memaksa ribuan Pondok Pesantren menjadi satu pola atau warna. Karena tingkat pluralitas dan independensi yang kuat inilah dirasakan sulit untuk memberikan konsep definitif tentang Pondok Pesantren.¹⁹ Ini belum termasuk permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan zaman, dimana pesantren harus melakukan perubahan-perubahan. Mastuhu menulis;

Hal-hal tersebut akan "memaksa" pesantren untuk mencari bentuk baru yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemajuan ilmu dan teknologi, tetapi tetap dalam kandungan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁰

Namun, dari berbagai pola, klasifikasi, warna dan corak, secara umum orientasi pendidikan Pondok Pesantren berbasis kepada beberapa hal sebagai berikut :

1. *Tafaqquh fi ad-Dîn.*

Apapun tema yang diajarkan dan bagaimanapun metode pengajarannya, atau bagaimana pun visi dan misi pendiri dan pengasuh, model pendidikan yang dikembangkan pondok pesantren memiliki satu tujuan yang sama, yakni pusat *Tafaqquh fi ad-Dîn*—atau *Center of Islamic Studies* (Pusat Studi Islam). Pondok Pesantren tetap menjadi pusat studi Islam—sekalipun belakangan muncul model pondok pesantren pertanian, pondok pesantren wira usaha dan lain sebagainya. Bagi penulis, itu semua hanyalah sebagai corak atau warna, sedangkan orientasi asal dan asli adalah pembentukan watak, akhlak dan karakter melalui pendalaman dan aktualisasi materi-materi agama. Jika di kemudian hari sebuah pesantren membuka pendidikan umum, maka hal itu sebagai dinamika dunia pesantren, dan pesantren tidak melupakan untuk tetap menyelenggarakan

¹⁹ Marzuki Wahid, *Pesantren di Lautan Pembangunanisme : Mencari Kinerja Pemberdayaan*”, dalam *Pesantren Masa Depan : Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, Bandung, Pustaka Hidayah, 1999, 145-147.

²⁰ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sisten Pendidikan Pesantren*, Ibid, hal. 12.

pendidikan kitab kuning.²¹ Berdasarkan pemaparan ini, kritik terhadap kurikulum pengajaran beberapa materi Kitab Kuning sebagai *jumud*, rigid nan sempit adalah kritik yang salah alamat karena materi-materi itu hanyalah sebuah baju belaka.²²

2. Bebas.

Masing-masing pondok pesantren yang berdiri dan dikembangkan oleh pengasuhnya bebas memilih tema yang didalami di pesantren. Pengasuh yang memiliki latar belakang keilmuan fiqih, misalnya, akan memfokuskan pendidikan di Pondok Pesantrennya dengan pengajaran fiqih—tidak berarti mengabaikan materi lainnya. Sekalipun ada fokus-fokus pada pengajaran di Pondok Pesantren, seorang kiai sudah tentu juga menguasai berbagai disiplin ilmu. Kiai Mahfudz At-Tirmisi, misalnya, sekalipun beliau dikenal sebagai ahli Hadits, namun beliau juga mampu dan menguasai berbagai disiplin ilmu dalam studi Islam.²³ Demikian juga dengan pendidikan di pondok pesantren yang pengasuhnya merupakan pemimpin tarekat, maka kegiatan pendidikannya akan lebih kental dengan praktik membaca dzikir-dzikir yang dikembangkan oleh pendiri tarekat. Dengan demikian, berbicara tentang materi pendidikan (atau pengajaran) di pondok pesantren, kita tidak bisa menyamakan persepsi masing-masing pengasuh Pondok Pesantren.

3. Komprehensif.

Yaitu memadukan konsep *Tarbiyah* dan *Ta'lim* (pengajaran dan pendidikan) menjadi satu kesatuan konsep dan makna yang tidak terpisahkan. Konsep pemaduan ini dilakukan sebab Pondok Pesantren memahami bahwa puncak keabadian manusia ada pada karakter atau akhlaknya. Sehingga, penanaman nilai-nilai akhlak bukan lagi sekedar *penting* atau *dipentingkan*—dalam istilah yang ditulis oleh Haidar

²¹ Haidar Putra Daulay, *Historitas dan Eksistensi*, Op. cit., hal. 31.

²² Suwendi, *Sejarah & Pemikiran Pendidikan Islam*, PT. Rajagrafindo, Jakarta, 2004, hal. 119-120.

²³ Lihat Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren*, Op. cit., hal. 135-156.

Daulay²⁴—melainkan itu adalah tujuan terbesar didirikannya Pondok Pesantren. Penanaman—dan pengamalan—nilai-nilai akhlak juga menjadi ciri-ciri kurikulum Pondok Pesantren. Sebagaimana yang diterangkan oleh Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany,²⁵ ciri-ciri umum kurikulum pendidikan Islam harus meliputi minimal hal-hal sebagai berikut :

- a. Agama dan Akhlak merupakan tujuan utama. Segala yang diajarkan dan diamalkan harus berdasarkan pada Al-Qur`an dan As-Sunnah serta Ijtihad para ulama.
- b. Mempertahankan pengembangan dan bimbingan terhadap semua aspek pribadi siswa dari segi intelektual, psikologi, sosial dan spiritual.

Dari keterangan ini, sangat tepat jika dalam kurikulum pendidikan Islam seperti di Pondok Pesantren ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip yang patut dipertimbangkan seperti sebagai berikut :

1. Teo-sentris, artinya seluruh aktifitas kegiatan dipandang sebagai ibadah kepada Tuhan.
2. Sukarela dan mengabdikan, maksudnya penyelenggaraan pesantren dilaksanakan secara sukarela dan mengabdikan kepada sesama dalam rangka mengabdikan kepada Tuhan.
3. Kearifan, yakni bersikap dan berperilaku sabar, rendah hati, patuh pada ketentuan hukum agama, mampu mencapai tujuan tanpa merugikan orang lain, dan mendatangkan manfaat bagi kepentingan bersama.
4. Kesederhanaan, artinya tidak sama dengan kemiskinan, tetapi sebaliknya identik dengan kemampuan bersikap dan berpikir wajar, proporsional dan tidak tinggi hati.

²⁴ Haidar Putra Daulay, *Historitas dan Eksistensi*, Op. cit., hal. 11.

²⁵ Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, sebagaimana dikutip oleh Dr. Armai Arief, dalam *Pengantar Ilmu Metodologi Pendidikan Islam*, Ciputat Pers, 2002, hal. 33.

5. Kolektivitas, maksudnya pesantren menekankan pentingnya kolektivitas atau kebersamaan lebih tinggi daripada individualisme.
6. Mengatur kegiatan bersama, prinsipnya adalah para santri mengatur hampir semua kegiatan proses belajar-mengajar terutama berkenaan dengan kegiatan-kegiatan *kokurikuler*, dari sejak pembentukan organisasi santri, penyusunan program-programnya, sampai pelaksanaan dan pengembangannya.
7. Kebebasan terpimpin, terutama dalam menjalankan kebijaksanaan kependidikannya. Prinsip tersebut bertolak dari ajaran bahwa semua makhluk pada akhirnya tidak dapat keluar melampaui ketentuan *sunatullah*,. di samping itu juga kesadaran bahwa masing-masing anak dilahirkan menurut *fitrahnya* dan masing-masing individu memiliki kecenderungan sendiri-sendiri.
8. Mandiri, yakni mengatur dan bertanggung jawab atas keperluannya sendiri, seperti: mengatur uang belanja, memasak, mencuci pakaian, merencanakan belajar, dan sebagainya.
9. Pesantren adalah tempat mencari ilmu dan mengabdikan, maknanya bahwa pesantren adalah tempat mencari ilmu dan mengabdikan. Tetapi pengertian ilmu menurut mereka tampak berbeda dengan pengertian ilmu dalam arti *science*. Ilmu bagi pesantren dipandang suci dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ajaran agama. Mereka selalu berpikir dalam kerangka keagamaan, artinya semua peristiwa empiris dipandang dalam struktur relevansinya dengan ajaran agama.
10. Mengamalkan ajaran agama, artinya setiap gerak kehidupannya selalu berada dalam batas rambu-rambu hukum agama (*fihih*).
11. Tanpa ijazah, Keberhasilan bukan ditandai oleh ijazah yang berisikan angka-angka sebagaimana madrasah dan sekolah umum, tetapi ditandai oleh prestasi kerja yang diakui oleh khalayak (masyarakat), kemudian direstui oleh kiai.

12. Restu kiai, Semua perbuatan yang dilakukan oleh setiap warga pesantren sangat tergantung pada restu kiai. Baik ustaz maupun santri selalu berusaha jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan kiai.²⁶

Dari prinsip-prinsip pendidikan di pesantren di atas dapat disimplifikasi sebagai berikut :

1. Mata Pelajaran dapat berpengaruh terhadap pendidikan serta kesempurnaan jiwa anak didik.
2. Mata Pelajaran yang diberikan dapat memberikan petunjuk serta tuntunan untuk menjalani hidup dengan mulia.
3. Mata Pelajaran sebaiknya secara langsung dapat memberikan manfaat bagi anak didik di dalam hidupnya.
4. Mata Pelajaran hendaknya mencerminkan pendidikan kejiwaan yang sesuai dengan bakat dan keinginan anak.
5. Mata Pelajaran hendaknya dapat menjadi alat pembuka jalan untuk mempelajari ilmu-ilmu lain.²⁷

B. Manajemen Pendidikan

Pengertian umum manajemen adalah segenap proses, biasanya terdapat pada semua kelompok baik usaha negara, pemerintah atau swasta, sipil atau militer secara besar-besaran atau secara kecil-kecilan. The Liang Gie memberikan rumusan manajemen adalah segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama kelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.²⁸ Harold Kontz dan Cyril O'Donnel memberikan batasan bahwa manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain, dengan demikian seorang manajer mengadakan

²⁶ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sisten Pendidikan Pesantren*, Ibid, hal. 12.

²⁷ Armai Arief, *Ibid*, hal. 33-34.

²⁸ Dikutip Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan*, Aditya Media-FIP UNY, Yogyakarta, Cet. IV, Des 2008, hal. 3.

koordinasi atas sejumlah aktifitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, penggerakan dan pengendalian.²⁹ Sedangkan manajemen pendidikan adalah “suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, agar efektif dan efisien”.³⁰

Dalam perkembangan studi ilmu manajemen, muncul istilah Manajemen Pendidikan Islam yang sebenarnya memiliki fungsi-fungsi manajerial yang sama dengan manajemen pada umumnya, tetapi dalam penerapannya dipengaruhi oleh tipe, sifat dan jenis organisasi. Suatu organisasi atau lembaga pendidikan Islam sudah selayaknya berusaha mengejawentahkan nilai-nilai Islam di dalam sistem pendidikannya. Manajemen Pendidikan Islam dapat didefinisikan sebagai se bentuk kerjasama untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dengan menjadikan Islam sebagai landasan dalam praktik operasionalnya untuk mencapai tujuannya.³¹

Secara umum, manajemen memiliki fungsi-fungsi tersendiri.³² Fungsi-fungsi tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Perencanaan, yaitu suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang yang diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal.

Prinsip-prinsip perencanaan pendidikan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan nilai-nilai yang jelas; dalam hal ini nilai-nilai keagamaan dan tradisi pesantren.

²⁹ Marno & Triyo Supriyanto, *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*, Refika Aditama, Bandung 2008, hal 1.

³⁰ *Manajemen Pendidikan*, Op.cit., hal. 4.

³¹ *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*, Op.cit., hal. 4-5.

³² *Manajemen Pendidikan*, Op.cit., hal. 9-14; *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*, Op.cit., hal. 11-28.

- b. Berangkat dari tujuan umum atau khusus; terutama tujuan mencetak santri yang berketrampilan.
 - c. Realistis; maksudnya rencana muatan kurikulum adalah sesuai dengan *input* sekaligus desain *output*.
 - d. Kondisi sosio-budaya masyarakat; faktor sosio-antropologis menjadi salah satu titik tolak perencanaan dan penyusunan kurikulum.
 - e. Perencanaan hendaknya fleksibel; yakni perencanaan kurikulum yang lentur dan menerima kreasi-kreasi perubahan ke arah yang lebih baik, tepat serta sesuai dengan zamannya.³³
2. Pengorganisasian, yaitu usaha untuk mewujudkan kerjasama antar manusia yang terlibat kerjasama itu, dengan mendayagunakan sumber-sumber yang ada.

Pengorganisasian, menurut Mahmud Hawary, disebutkan sebagai berikut :

وضع كل شيء في مكانه وكل شخص في مكانه وربط الاشياء ببعضها والاشخاص ببعضها
من اجل تكوين وحدة متكاملة اكبر من مجرد الجمع الحسابي لأجزائها

*(Pengorganisasian adalah) menjalankan sesuatu sesuai dengan fungsinya, demikian juga setiap anggotanya dan merupakan ikatan dari perorangan terhadap yang lain, guna melakukan kesatuan tindakan yang tepat, menuju suksesnya fungsi masing-masing.*³⁴

Pengorganisasian kurikulum dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu konteks manajemen dan akademik.³⁵ Konteks manajemen artinya kurikulum tersebut memiliki semangat perencanaan, implementasi dan evaluasi. Sedangkan konteks akademik, maksudnya adalah muatan-muatan mata pelajaran, korelasi dan integrasinya. Prinsip-prinsip pengorganisasian

³³ KH. U. Saefullah, *Manajemen Pendidikan Islam*, Ibid., hal. 238.

³⁴ Sebagaimana dikutip oleh Fathor Rachman, *Manajemen Organisasi dan Pengorganisasian Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits, Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman*, Vol.1 No.2 Desember 2015 : ISSN 2442-8566, hal 298.

³⁵ *Manajemen Pendidikan*, Ibid., hal. 73.

pendidikan meliputi produktivitas, demokratisasi, kooperatif, efektifitas dan efisiensi.³⁶

a. Produktivitas

Hasil yang akan diperoleh dalam pengorganisasian kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana program kerja pendidikan dapat tercapai, yang pada akhirnya peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum.

b. Demokratisasi

Pengorganisasian manajemen kurikulum harus berdasarkan pada demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab untuk mencapai tujuan kurikulum.

c. Kooperatif

Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat.

d. Efektifitas dan efisiensi

Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relative singkat.

3. Pengarahan, yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh pimpinan untuk memberikan penjelasan, petunjuk serta bimbingan kepada orang-orang yang menjadi bawahannya sebelum dan selama melaksanakan tugas.

³⁶<http://k3311020.blogspot.co.id/2013/05/makalah-manajemen-kurikulum.html>
diunduh pada 20 Januari pukul 20.30.

4. Pengkoordinasian, suatu usaha yang dilakukan oleh pimpinan untuk mengatur, menyatukan, menserasikan dan mengintegrasikan semua kegiatan yang dilakukan oleh bawahan.
5. Pengkomunikasian, suatu usaha yang dilakukan oleh pimpinan lembaga untuk menyebarluaskan informasi yang terjadi di dalam maupun hal-hal di luar lembaga yang ada kaitannya dengna kelancaran tugas mencapai tujuan bersama.
6. Pengawasan, usaha pimpinan untuk mengetahui semua hal menyangkut pelaksanaan kerja, khususnya kelancaran kerja para pegawai dalam melakukan tugas.

Prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh seorang pengawas, sebagaimana diterangkan oleh The American Avaluastion, mencakup beberapa poin sebagai berikut :

- a. Penelaahan sistematis.
- b. Kompetensi.
- c. Integritas/kejujuran.
- d. Menghargai orang.
- e. Tanggung jawab untuk kesejahteraan umum.³⁷

Sedangkan prinsip-prinsip evaluasi kurikulum dapat diringkaskan sebagai berikut :

- a. Tujuan
- b. Objektif :
- c. Komprehensif
- d. Kooperatif
- e. Efisien
- f. Berkesinambungan³⁸

³⁷Mohamad Mustari, *Manajemen Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet I, 2014, hal. 95.

³⁸<https://zhizhachu.wordpress.com/tag/prinsip-prinsip-evaluasi-kurikulum/> diunduh pada 20 Januari pukul 20.30.

Manajemen pendidikan memuat beberapa komponen yang menjadi organ penting dalam mengelola sebuah lembaga atau satuan pendidikan. Masing-masing komponen manajemen itu memiliki pengertian, ruang lingkup dan mekanisme sendiri. Komponen-komponen itu adalah sebagai berikut³⁹ :

1. Manajemen Kurikulum
2. Manajemen Siswa
3. Manajemen Kepegawaian
4. Manajemen Sarana & Prasarana
5. Manajemen Pembiayaan
6. Manajemen Tata Usaha
7. Manajemen Humas
8. Manajemen Supervisi

Ruang lingkup manajemen pendidikan dapat dilihat dari 4 sudut pandang, yaitu sudut wilayah kerja, obyek garapan, urutan kerja dan pelaksana.⁴⁰

1. Ruang lingkup menurut wilayah kerja

Sistem pendidikan di Indonesia adalah sistem sentralisasi. Oleh karenanya, lingkup manajemen pendidikan dalam konteks ini dipisahkan menjadi beberapa ruang sebagai berikut⁴¹ :

- a. Manajemen Pendidikan Nasional
- b. Manajemen Pendidikan Provinsi
- c. Manajemen Pendidikan Unit Kerja
- d. Manajemen Pendidikan Kelas

2. Ruang lingkup menurut obyek garapan.

³⁹ *Manajemen Pendidikan*, Op.cit., hal. v-viii.

⁴⁰ Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan*, Op.cit., hal. 5.

⁴¹ Lihat selengkapnya di *Manajemen Pendidikan*, Op.cit., hal. 5.

Yaitu semua jenis kegiatan manajemen yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam kegiatan mendidik. Dengan titik tolak pada kegiatan ini yaitu kegiatan belajar mengajar di kelas, maka sekurangnya ada 8 obyek garapan, yaitu⁴² :

- a. Manajemen siswa
 - b. Manajemen SDM
 - c. Manajemen kurikulum
 - d. Manajemen sarana & prasarana
 - e. Manajemen ketatausahaan
 - f. Manajemen pembiayaan
 - g. Manajemen organisasi pendidikan
 - h. Manajemen hubungan masyarakat
3. Ruang lingkup menurut urutan kegiatan atau fungsi.

Ruang lingkup manajemen pendidikan dari sisi ini ditinjau dari urutan kegiatan pengelolaan, yaitu⁴³ :

- a. Merencanakan
 - b. Mengorganisasikan
 - c. Mengarahkan
 - d. Mengkoordinasikan
 - e. Mengkomunikasikan
 - f. Mengawasi atau mengevaluasi
4. Ruang lingkup menurut pelaksana

⁴² Lihat selengkapnya di *Manajemen Pendidikan*, Op.cit., hal. 6.

⁴³ Lihat selengkapnya di *Manajemen Pendidikan*, Op.cit., hal. 6.

Manajemen adalah suatu kegiatan yang bersifat melayani.⁴⁴ Dari pengertian itu, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh perangkat yang ada di sekolah adalah pelayan pendidikan dengan kepada sekolah sebagai manajernya.

Dalam implementasi kurikulum, terdapat beberapa prinsip yang menunjang tercapainya keberhasilan, yaitu:

- a. Perolehan kesempatan yang sama.
- b. Berpusat pada anak.
- c. Pendekatan dan kemitraan.
- d. Kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan.⁴⁵

C. Kurikulum SMK

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.⁴⁶ Kurikulum dapat juga dipahami melalui tiga pemahaman atau pengertian; yakni sempit sekali, sempit dan luas.⁴⁷

1. Dalam arti sempit sekali, kurikulum adalah jadwal pelajaran.
2. Dalam arti sempit, kurikulum adalah semua pelajaran baik teori maupun praktik yang diberikan kepada anak didik selama mengikuti proses pendidikan.

⁴⁴ Lihat selengkapnya di *Manajemen Pendidikan*, Op.cit., hal. 6.

⁴⁵<http://d-scene.blogspot.co.id/2012/03/implementasi-kurikulum.html> diunduh pada 20 Januari pukul 20.30.

⁴⁶ Lihat *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Bab I, Pasal 1, Ayat 19, lihat juga Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, Arruz Media, Cet. II, Yogyakarta, Desember 2007, halaman 205.

⁴⁷ *Manajemen Pendidikan*, Op.cit., hal. 131-132.

3. Dalam arti luas, kurikulum adalah semua pengalaman yang diberikan oleh lembaga atau satuan pendidikan kepada anak didik selama mengikuti pendidikan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, sebuah lembaga atau satuan pendidikan harus memperhatikan komponen-komponen manajemennya, yang meliputi : Kurikulum, Siswa, Kepegawaian, Sarana & Prasarana, Pembiayaan, Tata Usaha, Humas dan Supervisi. Pengertian manajemen kurikulum di sini adalah segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran dengan titik berat pada usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar.⁴⁸ Manajemen kurikulum harus memperhatikan pedoman-pedoman pelaksanaan kurikulum, yakni sebagai berikut :

1. Penyusunan Struktur Kurikulum
2. Penyusunan Silabus
3. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
4. Penyusunan Jadwal Pelajaran
5. Penyusunan Kalender Akademik

Berdasarkan Undang-Undang, jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, dan jenis-jenis pendidikan meliputi pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.⁴⁹ Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Pengertian Pendidikan Menengah Kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu.⁵⁰ Pendidikan Menengah Kejuruan dikembangkan lebih mengutamakan penyiapan siswa

⁴⁸ *Manajemen Pendidikan*, Op.cit., hal. 131.

⁴⁹ Lihat *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Bab VI, Pasal 14-15.

⁵⁰ Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990, Bab I, Pasal 1, ayat 3.

untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional,⁵¹ yang kurikulumnya berlaku secara nasional dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Menteri lain berdasarkan pelimpahan wewenang dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.⁵²

Pendidikan Menengah Kejuruan atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki banyak program keahlian. Program keahlian yang dilaksanakan di SMK menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja yang ada. Program keahlian pada jenjang SMK juga menyesuaikan pada permintaan masyarakat dan pasar (*lihat Tabel Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan 2016*). Peserta didik dapat memilih bidang keahlian yang diminati di SMK.⁵³ Kurikulum SMK dibuat agar peserta didik siap untuk langsung bekerja di dunia kerja. Muatan kurikulum yang ada di SMK disusun sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang ada. Hal ini dilakukan agar peserta didik tidak mengalami kesulitan yang berarti ketika masuk di dunia kerja. Dengan masa studi selama tiga atau empat tahun, lulusan SMK diharapkan mampu untuk bekerja sesuai dengan keahlian yang telah ditekuni.

Tujuan dikembangkannya Pendidikan Menengah Kejuruan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus.⁵⁴ Tujuan Umum Pendidikan Menengah Kejuruan adalah :

1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga Negara yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab;

⁵¹ Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990, Bab II, Pasal 3, ayat 2.

⁵² Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990, Bab VII, Pasal 15, ayat 4.

⁵³ Lihat Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud, Nomor 4678/D/KEP/2016 tentang *Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan*.

⁵⁴ Diikhtisarkan dari Bab II dan Bab III *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

3. Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki wawasan kebangsaan, memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia; dan
4. Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup dengan secara aktif turut memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan efektif dan efisien.

Sedangkan Tujuan Khusus Pendidikan Menengah Kejuruan adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya;
2. Menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam berkompentensi, beradaptasi di lingkungan kerja dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya;
3. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi; dan
4. Membekali peserta didik dengan kompetensi kompetensi yang sesuai dengan program keahlian yang dipilih.

Pengembangan SMK menjadi salah satu kiat pemerintah dalam menghadapi globalisasi, dengan mencetak tenaga terampil tingkat menengah. Kementerian Pendidikan & Kebudayaan juga mengembangkan kurikulumnya dalam berbagai bidang keahlian, program keahlian dan kompetensi keahlian.

Jumlah	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian
	9	48	142

Tabell Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan 2016

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian pendidikan berbasis pesantren di satu sisi, dan pendidikan kejuruan di sisi lainnya, telah sama-sama banyak dilakukan. Masing-masing penelitian tersebut memiliki fokus yang berbeda-beda. Penulis telah menemukan dan menelaah beberapa penelitian, yang membahas pendidikan pesantren secara umum, dan pendidikan kejuruan secara umum pula, antara lain sebagai berikut :

1. Inovasi dan Modernisasi Pendidikan Pondok Pesantren

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Hasan ini memotret model inovasi dan modernisasi dalam konteks pendidikan Islam di pesantren. Kajian inovasi dan modernisasi pesantren itu dilakukan karena mengandung beberapa makna penting, *pertama*, kajian inovasi dan modernisasi pesantren merupakan kajian yang relevan dalam konteks keindonesiaan yang sedang melakukan proses pembangunan dan modernisasi; *kedua*, pesantren merupakan subkultur pendidikan Islam Indonesia sehingga dalam menghadapi inovasi dan modernisasi akan memberikan warna yang unik; *ketiga*, pendidikan pesantren merupakan *prototype* model pendidikan yang ideal bagi bangsa Indonesia. Kesimpulan akhir penelitian ini adalah bahwa terma inovasi dan modernisasi yang harus dilakukan oleh pondok pesantren terkait dengan perubahan sosial. Dalam konteks pesantren saat ini, setidaknya ada tiga

aspek dalam modernisasi, inovasi, dan pembaruan pesantren, yaitu pada aspek metode, isi materi, dan manajemen pengelolaannya.⁵⁵

2. Pendidikan Pesantren dan Tantangan Modernisasi

Penulis penelitian ini, Hafid, menjelaskan tentang pendidikan pesantren secara umum.⁵⁶ Diawali dengan kategorisasi pesantren, lalu memberikan gambaran citra diri pesantren dalam 3 tipologi—yang mengutip Hadi Mulyo. Dikatakan dalam penelitian ini, bahwa kerisauan yang terjadi di pesantren adalah dampak dari modernisasi. Kerisauan terjadi disebabkan karena umat Islam belum mampu memanfaatkan berbagai kemajuan di bidang komunikasi, informasi dan teknologi secara global. Justru yang menguasai adalah komunitas masyarakat maju yang tidak bertanggung jawab dengan menebarkan kemungkarannya, dekadensi moral dan budaya maksiat lainnya. Yang harus dilakukan oleh akademisi pesantren adalah respon positif, bukan menghindari apalagi menutup pintu diri dengan pakal besi yang kukuh. Konsep modernisasi di Indonesia tampaknya ada kemauan keras bahwa modernisasi tidak identik dengan westernisasi. Posisi penelitian ini baru sekedar *menghimbau* pondok pesantren agar tidak gentar untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pendidikannya.

3. Integrasi Sekolah ke Dalam Sistem Pendidikan Pesantren

Penelitian Nurhadi ini menyatakan bahwa proses pendidikan dan proses penanaman nilai-nilai budi pekerti banyak dipengaruhi oleh faktor, baik di dalam maupun di luar sekolah.⁵⁷ Kondisi lingkungan juga ikut menentukan kualitas produk (*out put*) dari proses pendidikan. Hal inilah yang kurang disadari oleh masyarakat, sehingga apabila terjadi fenomena

⁵⁵ Muhammad Hasan, *Inovasi dan Modernisasi Pendidikan Pondok Pesantren*, dalam KARSA ; Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman, Vol. 23 No. 2, Desember 2015, halaman 295-305.

⁵⁶ Hafid, *Pendidikan Pesantren dan Tantangan Modernisasi*, dalam jurnal Kariman, Volume 01, No. 01, Tahun 2013.

⁵⁷ Nurhadi, *Integrasi Sekolah ke Dalam Sistem Pendidikan Pesantren*, Jurnal Edukasi, Volume 04, Nomor 01, Juni 2016, halaman 174-207.

kenakalan remaja, mereka menunding guru pelajaran budi pekerti seperti guru Agama, guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Bimbingan Konseling tidak sungguh-sungguh menanamkan nilai-nilai budi pekerti. Maka dari itu solusi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi krisis tersebut di atas adalah menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif dengan mengintegrasikan sekolah ke dalam sistem pendidikan pesantren, sehingga terbentuk lingkungan yang edukatif dan religius.

Krisis dalam bidang pendidikan dewasa ini, muncul dikarenakan beberapa faktor. Pertama, Faktor historis kolonialis dimana Belanda selalu mengambil kebijakan diskriminatif. Kedua, Faktor orientasi kehidupan sekuler sebagai pengaruh dari konsep pendidikan Barat. Ketiga, Faktor tidak adanya pembelajaran yang mengelola kecerdasan intelektual/*Intellectual Quotient*, kecerdasan emosional/*Emotional Quotient*, dan kecerdasan spiritual/*Spiritual Quotient* secara seimbang, Pendidikan kita lebih mengarah kepada mengolah kecerdasan akademik/intelektual yang tidak berorientasi pada program solving. Keempat, kondisi lingkungan yang kurang edukatif (lingkungan dalam sekolah yaitu: budaya sekolah, sikap perilaku dan tutur kata warga sekolah).

4. Pendidikan Kejuruan

Rasto (Universitas Pendidikan Indonesia) melalui penelitian ini menjelaskan secara komprehensif hal-hal berkaitan dengan pendidikan kejuruan. Diawali dengan pembahasan Terminologi Pendidikan Kejuruan, tulisan ini membahas beberapa sub tema—secara umum—antara lain Urgensi, Falsafah serta Karakteristik Pendidikan Kejuruan, juga Model Pendidikan dan Kurikulum SMK.⁵⁸ Penelitian tersebut masih bersifat umum, dan belum fokus pada masalah-masalah terperinci.

⁵⁸ Rasto, Pendidikan Kejuruan (Online), 2012. http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI._PENDIDIKAN_MANAJEMEN_PERKANTORAN/132296305-RASTO/Manajemen%20Pendidikan/Tinjauan%20Pustaka/Pendidikan%20Kejuruan.pdf diunduh pada tanggal 8 November 2016, pukul 19.00

5. Peran Pendidikan Kejuruan dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Penelitian ini dilakukan oleh Bintoro Johan⁵⁹ dan membahas tentang pentingnya peranan dunia pendidikan—baik formal, non formal dan informal atau kejuruan—dalam menyongsong datangnya MEA. Ini disebabkan fakta MEA akan melahirkan dampak bagi manusia Indonesia untuk mengejar kompetensi yang diharapkan agar masyarakat Indonesia dapat bersaing dengan masyarakat negara Negara ASEAN pada pasar bebas MEA.

Pendidikan kejuruan memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yakni melalui kemampuan untuk menghasilkan SDM atau tenaga kerja yang terampil dan produktif sesuai tuntutan era globalisasi. Pendidikan kejuruan dapat diartikan sebagai pendidikan keduniakerjaan. Dunia kerja dan pekerjaan berubah dan berkembang akibat kemajuan teknologi. Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan kejuruan yang efektif perlu diperhatikan adanya beberapa prinsip pendidikan kejuruan.

Penelitian yang penulis lakukan ini saat kebutuhan untuk mengkonsep pendidikan SMK berbasis pesantren semakin dibutuhkan. Penelitian-penelitian yang sudah ada masih berbicara pada tataran konsep umum atau terbatas, dan belum ada yang melakukan penelitian secara khusus pada pengembangan atau manajemen kurikulum. Hal inilah yang membawa penelitian yang ada di tangan pembaca ini menarik untuk dilakukan, dan menjadi penyempurna atas penelitian-penelitian terdahulu.

E. Kerangka Berpikir

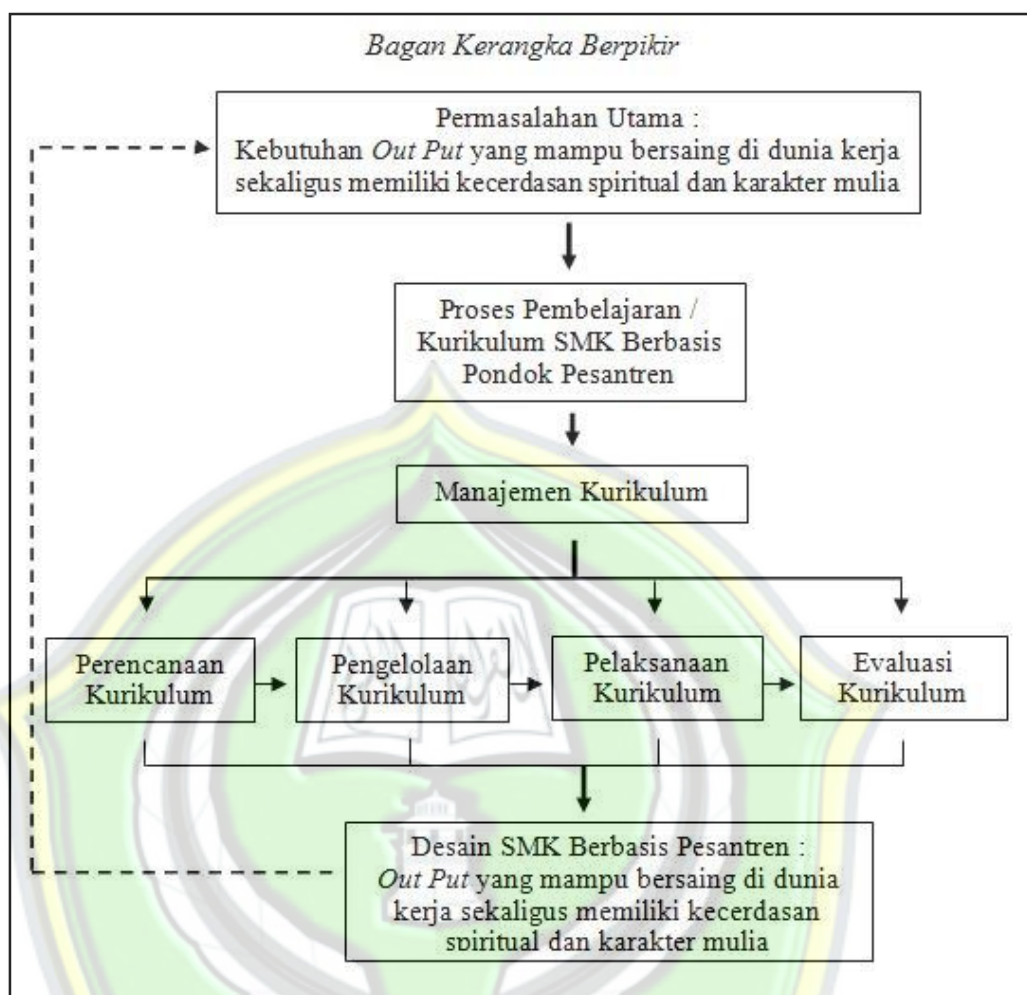
⁵⁹ Arif Bintoro Johan, *Peran Pendidikan Kejuruan dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*, dalam Jurnal Akademik Universitas Taman Siswa, 5 November 2015.

Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi obyek permasalahan yang sedang dibahas, dan yang berpikir disusun berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Ia merupakan suatu argumentasi dalam merumuskan hipotesis yang menggunakan logika berpikir induktif. Kerangka berpikir yang akan dihasilkan dapat berupa kerangka berpikir komparatif. Kerangka model ini dapat digambarkan dengan kalimat jika begini maka begitu.⁶⁰ Penyusunan kerangka berpikir dengan menggunakan argumentasi-argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan ini akhirnya melahirkan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, kerangka berpikir yang digambarkan adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan utama adalah kebutuhan *out put* yang mampu bersaing di dunia kerja sekaligus memiliki kecerdasan spiritual dan karakter mulia.
2. Dari permasalahan ini, diperlukan suatu kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan kurikulum pendidikan SMK yang memfokuskan pada ketrampilan dengan model pendidikan di pesantren yang memfokuskan kepada kajian keagamaan dan moral.
3. Jika manajemen pendidikan berjalan dengan baik, maka akan menghasilkan *out put* yang baik pula. Dengan kata lain, perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum pendidikan SMK berbasis pesantren ini berdasarkan pada visi dan misi penyelenggara, maka hal itu akan menghasilkan desain SMK berbasis pesantren yang *out put*-nya akan maksimal.

Secara jelas, kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan pada bagan berikut ini:

⁶⁰ Husaini, Usman dan Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal 76.



Gambar 1 Bagan kerangka berpikir